

BAB II

MOBILITAS MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

UMUM DI KOTA BOGOR

Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi semakin mendesak. Di Kota Bogor, berbagai kebijakan transportasi umum telah diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi penduduknya. Kota Bogor berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sehingga pemerintah berusaha mendukung penggunaan transportasi publik. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan transportasi umum, seperti kebutuhan infrastruktur dan pengaturan lalu lintas, juga akan dibahas untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi mobilitas yang diterapkan. Dengan demikian, kebijakan dapat diambil untuk meningkatkan sistem transportasi umum di masa mendatang.

2.1 Profil Kota Bogor

Kota Bogor yang terletak di Provinsi Jawa Barat memiliki sejarah dan karakteristik yang khas. Kota ini memiliki fungsi sebagai daerah penyangga bagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara. Kota Bogor terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan, serta memiliki lebih dari satu juta penduduk dan memiliki banyak potensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu ikon pariwisata menjadi daya tarik tersendiri. Dengan memiliki curah hujan yang tinggi, Kota Bogor juga berfungsi sebagai pusat riset botani dan pertanian nasional. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat selalu dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi angka pengangguran. Melalui berbagai program pemerintah, diharapkan Kota Bogor dapat terus berkembang menjadi kota yang nyaman dan berkelanjutan bagi warganya.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Kota Bogor terletak di antara garis bujur $106^{\circ}43'30''$ BT hingga $106^{\circ}51'00''$ BT dan garis lintang $6^{\circ}30'30''$ LS hingga $6^{\circ}41'00''$ LS dengan memiliki kemiringan lereng antara 0-3%, 4-15%, 16-30% dan diatas 40%, dikelilingi oleh Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede yang memberikan posisi geografis yang strategis di Pulau Jawa. Dengan ketinggian yang bervariasi, kota ini memiliki elevasi minimum sekitar 190 meter dan maksimum mencapai 330 meter di atas permukaan laut. Iklim di Bogor termasuk dalam kategori tropis yaitu tipe Hutan Hujan Tropis.

Kota Bogor memiliki luas wilayah sekitar 11.850 hektar, yang dipisahkan menjadi enam kecamatan yang unik dan berbeda. Setiap kecamatan memiliki ukuran yang beragam, membantu menciptakan keragaman sosio-ekonomi. Contohnya, Kecamatan Bogor Selatan mencakup area seluas 30,50 km², diikuti oleh Bogor Barat yang memiliki luas 23,32 km², serta Tanah Sareal yang mencapai 20,60 km². Sementara itu, Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Tengah masing-masing memiliki luas 18,14 km², 10,46 km², dan 8,37 km². Selain itu, Kota Bogor juga terdiri dari 31 kelurahan dan 37 desa.



Gambar 2.1 Peta Kota Bogor

Sumber : Wikipedia Kota Bogor, 2025. (Wikipedia, 2025)

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bogor)

Suhu rata-rata di Bogor berkisar antara 25,50°C hingga 27,70°C setiap bulannya. Dalam rentang suhu tersebut, suhu terendah dapat mencapai 19,50°C hingga 22,20°C pada malam hari atau saat cuaca mendung, sedangkan suhu tertinggi berada diantara 32,3°C hingga 36,0°C pada siang hari yang cerah. Selain itu, Kota Bogor dikenal dengan tingkat kelembaban udaranya yang cukup tinggi, berkisar antara 72,20% hingga 86,30%. Kondisi ini menjadikan Kota Bogor dijuluki sebagai "Kota Hujan," mengingat rata-rata jumlah hari hujan mencapai sekitar 18 hari per bulan pada tahun 2023. Kecepatan angin di Bogor bervariasi; maksimum dapat mencapai antara 10 hingga 32 knot dengan rata-rata kecepatan angin berada di kisaran 13 hingga 24 knot.

Kecamatan Bogor Tengah dikenal dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mencapai 11.770 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki

kepadatan yang relatif rendah, yakni 5.019 jiwa/km². Letak geografis Kota Bogor yang strategis diantara wilayah Kabupaten Bogor dan dekat dengan DKI Jakarta, memberikan potensi besar untuk perkembangan ekonomi dan pelayanan di berbagai sektor. Keberadaan kota ini sebagai pintu antara kawasan suburban dan metropolitan membuatnya menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Dengan kemudahan aksesibilitas, Bogor tidak hanya menarik bagi penduduk lokal, tetapi juga bagi para investor dan pelancong, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan daya tarik kawasan ini. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor didukung oleh Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor yang menjadi tempat wisata.

Kota Bogor berada diantara jalur tujuan wisata Puncak-Cianjur sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Batas wilayah Kota Bogor pun sangat penting untuk dipahami agar kita dapat merayakan semua kebudayaan dan aktivitas yang dilakukan di kota ini. Di sisi utara, Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Sukaraja. Batas timur kota ini terletak di antara Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, sementara di sebelah barat, Kota Bogor bersebelahan dengan Kecamatan Dramaga dan Ciomas. Di bagian selatan, Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Bogor

Kota Bogor, yang terletak di provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor

pada semester pertama tahun 2024, jumlah penduduk di kota ini mencapai 1.137.018 jiwa. Dari total populasi tersebut, terdapat komposisi yang cukup seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan, di mana jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 575.169 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 561.849 jiwa. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9.613 jiwa per kilometer persegi, Kota Bogor menunjukkan dinamika sosial yang kompleks.

Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(4)	(5)
Bogor Selatan	19,45	7.190
Bogor Timur	9,66	10.409
Bogor Utara	18,13	11.273
Bogor Tengah	9,67	13.035
Bogor Barat	22,59	10.921
Tanah Sareal	20,49	11.215
Kota Bogor	100,00	10.122

Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk berdasarkan Catatan Administrasi menurut Kecamatan di Kota Bogor 2023

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2024. (Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024)

<https://bogorkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/aa94a4b5d6662971ebe2d881/kota-bogor-dalam-angka-2024.html>

Kecamatan Bogor Barat menempati posisi teratas dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 239.982 jiwa, yang setara dengan sekitar 22,41% dari total penduduk Kota Bogor. Sementara itu, Kecamatan Tanah Sareal mengikuti di urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 226.097 jiwa, yang berkontribusi sekitar

21,12% terhadap total populasi kota. Di sisi lain, Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, dengan total penduduk hanya mencapai 95.978 jiwa, atau sekitar 8,96% dari keseluruhan penduduk Kota Bogor.

Berdasarkan catatan administrasi yang mencakup data dari berbagai kecamatan di Kota Bogor pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk di kota ini selama periode 2020 hingga 2023 tercatat sebesar 1,20%, dengan total penduduk pada tahun 2020 mencapai 1.127.408 jiwa. Kecamatan Bogor Utara mencatatkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 2,12%, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Bogor Barat, meskipun memiliki total penduduk terbanyak pada saat itu, yaitu 254.629 jiwa, hanya mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,87%.

Peningkatan angka kelahiran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kota ini cenderung memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, yang berkontribusi pada penambahan jumlah penduduk. Sementara itu, di tingkat nasional, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023, dengan angka mencapai 1,13%. Angka ini merupakan yang terendah dalam delapan tahun terakhir, mencerminkan perubahan demografis yang lebih luas yang terjadi di seluruh negeri. Dengan demikian, Kota Bogor tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan penduduk yang signifikan di Jawa Barat, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kota ke depan. Kota Bogor, yang terletak di provinsi

Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor pada semester pertama tahun 2024, total jumlah penduduk di kota ini mencapai 1.137.018 jiwa. Dari total populasi tersebut, terdapat komposisi yang cukup seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan, di mana jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 575.169 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 561.849 jiwa. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9.613 jiwa per kilometer persegi, Kota Bogor menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dan beragam.

Tabel 3.1.5 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Catatan Administrasi menurut Kecamatan di Kota Bogor, 2023
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio based on Administration Records by District in Bogor Municipality, 2023

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2023 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Bogor Selatan	219.309	1,30
Bogor Timur	108.919	0,65
Bogor Utara	204.454	2,12
Bogor Tengah	109.057	-0,25
Bogor Barat	254.629	0,87
Tanah Sereal	231.040	1,63
Kota Bogor	1.127.408	1,20

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan Catatan

Administrasi menurut Kecamatan di Kota Bogor per tahun 2020 –2023

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024)

<https://bogorkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/aa94a4b5d6662971ebe2d881/kota-bogor-dalam-angka-2024.html>

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Pada tahun 2023, Kota Bogor mencatatkan rata-rata kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 10.122 jiwa per kilometer persegi. Di antara kecamatan-kecamatan yang ada, Kecamatan Bogor Tengah menempati posisi dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai angka 13.035 jiwa per kilometer persegi, yang mencerminkan bahwa sekitar 9,67% dari total populasi kota ini tinggal di wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Bogor Barat, meskipun memiliki persentase penduduk terbesar, yaitu 22,59%, menunjukkan tingkat kepadatan yang juga signifikan, yakni sebesar 10.921 jiwa per kilometer persegi.

Selain itu, rasio jenis kelamin atau sex ratio di Kota Bogor berada pada angka 102, yang berarti terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa populasi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2023, total populasi penduduk Kota Bogor didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah mencapai 570.333 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 555.075 jiwa. Kecamatan yang memiliki populasi terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat dengan total penduduk mencapai 254.629 jiwa.

Kecamatan District	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(6)	(7)	(8)
Bogor Selatan	111.894	107.415	104
Bogor Timur	54.831	54.088	101
Bogor Utara	103.966	100.488	103
Bogor Tengah	54.680	54.377	101
Bogor Barat	128.328	126.301	102
Tanah Sareal	116.634	114.406	102
Kota Bogor	570.333	557.075	102

Catatan/Note: Kondisi Desember 2023/December 2023 condition
Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor/Department of Population and Civil Registry of Bogor Municipality

Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Catatan

Administrasi menurut Kecamatan di Kota Bogor 2023

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024)

<https://bogorkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/aa94a4b5d6662971ebe2d881/kota-bogor-dalam-angka-2024.html>

Dalam komposisi penduduk di kecamatan ini, terdapat 128.328 jiwa laki-laki dan 126.301 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan, kecamatan ini tetap menjadi pusat konsentrasi penduduk di Kota Bogor. Dengan demikian, dinamika kependudukan di Kota Bogor tidak hanya mencerminkan pertumbuhan yang pesat, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

2.1.3 Mata Pencaharian di Kota Bogor

Pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor didukung sektor pariwisata yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pariwisata didukung oleh

objek wisata yang terdapat di Kota Bogor, seperti wisata alam, sejarah, kuliner, ilmiah, rekreasi, serta wisata berbasis ekonomi kreatif. Kota Bogor juga memiliki potensi pariwisata berbasis *botanical garden* dan pengembangan wisata budaya. Tak hanya potensi pariwisata, Kota Bogor pun memiliki potensi pengembangan industri pengolahan, seperti pabrik sepatu/sendal, kuliner, dan kerajinan dari olahan bambu. Industri pengolahan termasuk ke dalam faktor yang meningkatkan perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan industri kreatif untuk mendukung potensi sektor pariwisata sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Kota Bogor.

Tabel 2.1 Rincian Mata Pencarian Penduduk Kota Bogor Tahun 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)
Jasa	374.336
Perdagangan	134.076
Industri	103.586
Pertanian	6.412

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024)

(<https://bogorkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/aa94a4b5d6662971ebe2d881/kota-bogor-dalam-angka-2024.html>)

Kota Bogor memiliki beragam sumber mata pencarian yang mencerminkan karakteristik ekonomi dan sosial warganya. Berikut adalah beberapa sektor utama yang menjadi sumber pendapatan bagi penduduk Kota Bogor:

1. Sektor Pertanian

Pertanian tetap menjadi salah satu sumber mata pencarian utama di Kota Bogor, terutama di kawasan pinggiran. Banyak petani yang bergantung pada lahan

mereka untuk menanam berbagai komoditas, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Kota Bogor terkenal sebagai penghasil sayuran dan buah berkualitas tinggi, berkat kesuburan tanahnya dan iklim yang mendukung.

2. Sektor Perdagangan

Perdagangan juga memainkan peran penting dalam perekonomian Kota Bogor. Dengan adanya banyak pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, banyak penduduk terlibat dalam aktivitas perdagangan, baik sebagai pedagang kecil maupun pemilik toko. Pasar-pasar ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menarik pengunjung dari daerah sekitarnya.

3. Sektor Jasa

Sektor jasa, termasuk pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, semakin menunjukkan perkembangan di Kota Bogor. Banyaknya objek wisata alam dan budaya, seperti Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Selain itu, berbagai lembaga pendidikan dan rumah sakit juga menyediakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat.

4. Sektor Industri

Industri pengolahan mulai berkembang di Kota Bogor, meskipun skalanya belum sebesar sektor lainnya. Beberapa industri yang beroperasi di kota ini mencakup industri makanan dan minuman, tekstil, serta kerajinan tangan. Pertumbuhan sektor industri ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal.

5. Sektor Transportasi

Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus berlangsung, sektor transportasi menjadi semakin penting. Banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir angkutan umum, ojek, dan pengemudi layanan transportasi online. Sektor ini tidak hanya memberikan mata pencaharian, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan berbagai sektor mata pencaharian yang ada, Kota Bogor menunjukkan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Namun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti tingkat pengangguran dan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.2 Tingkat Mobilitas di Kota Bogor

Mobilitas sosial dipahami sebagai perubahan status dan stratifikasi sosial di dalam hierarki masyarakat. Hal ini mencakup pergeseran individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial. Dalam perspektif ekonomi, mobilitas sosial muncul sebagai akibat dari perubahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ketika individu atau kelompok mengalami peningkatan dalam pendapatan, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan status sosial mereka.

Giddens mendefinisikan mobilitas sosial sebagai pergerakan individu dan kelompok di tengah perbedaan dalam kelompok sosial-ekonomi (KOMPAS, 2022). Ini berarti bahwa individu dan kelompok tersebut melakukan perpindahan karena

faktor-faktor sosial-ekonomi yang berbeda, seperti akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Dengan demikian, mobilitas sosial tidak hanya mencerminkan perubahan dalam posisi individu, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam struktur masyarakat.

Mobilitas sosial terjadi karena adanya perubahan posisi individu dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar kerja (Kamilatunnisa, 2018). Proses ini tidak selalu linier dan dapat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya yang spesifik. Sementara itu, Aldridge (2003) mengartikan mobilitas sosial sebagai peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok-kelompok untuk mengalami perubahan (Krisnani, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial tidak hanya bergantung pada usaha individu, tetapi juga pada kondisi struktural yang memungkinkan atau membatasi kesempatan tersebut. Oleh karena itu, memahami mobilitas sosial memerlukan analisis yang mendalam terhadap interaksi antara individu, kelompok, dan struktur sosial-ekonomi yang lebih luas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial mencakup tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, dan modal sosial. Pendidikan memiliki peran yang besar dalam mobilitas sosial karena tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat akan berkompetisi mencapai prestasi yang tinggi guna melakukan mobilitas sosial. Maka dari itu, setiap negara memiliki kebijakan mengenai pendidikan karena pendidikan telah menjadi fokus perhatian sebuah negara. Tak hanya itu, latar belakang keluarga juga berpengaruh pada mobilitas sosial karena ketika keluarga memiliki posisi sosial

yang tinggi, maka kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan mobilitas sosial. Dalam lingkungan masyarakat, mobilitas sosial terjadi karena dipengaruhi oleh adanya modal sosial berupa interaksi antar kelompok di masyarakat, pemberian dukungan sosial, serta perluasan jaringan sosial.

Menurut laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa. Dari total tersebut, terdapat 563.033 jiwa laki-laki dan 550.985 jiwa perempuan, menunjukkan komposisi gender yang relatif seimbang di kota ini. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor melalui Survei Angkatan Kerja Nasional 2022, sebanyak 556.541 jiwa penduduk di Kota Bogor tergolong dalam angkatan kerja. Dari angka ini, 496.570 jiwa berhasil mendapatkan pekerjaan, sementara 59.971 jiwa teridentifikasi sebagai pengangguran terbuka. Informasi mengenai struktur demografis dan angkatan kerja ini sangat berpengaruh pada tingkat mobilitas di Kota Bogor. Tingginya jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam angkatan kerja memerlukan sistem transportasi yang efisien untuk mendukung pergerakan mereka.

Peran Kota Bogor sebagai kota penyangga bagi ibu kota Jakarta, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi krusial. Ketersediaan jalan yang baik tidak hanya akan memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mendukung distribusi barang antar daerah, yang sangat penting untuk perekonomian lokal. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga akan membantu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan

mengurangi kesenjangan antara daerah di dalam Kota Bogor. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mobilitas penduduk dan pembangunan yang berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024).

Mobilitas penduduk di Kota Bogor dapat dianalisis melalui tingkat migrasi yang terjadi di Kota Bogor berdasarkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, tercatat bahwa jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar sebanyak 17.699 jiwa. Angka ini mencerminkan dinamika sosial yang aktif, di mana banyak penduduk mencari peluang baru di daerah lain. Namun, pada tahun 2022, angka migrasi keluar mengalami penurunan yang hanya mencapai 16.906 jiwa. Angka migrasi keluar kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah mencapai 16.046 jiwa.

Jumlah migrasi masuk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 20.661 jiwa, yang menunjukkan bahwa Kota Bogor tetap menjadi magnet bagi pendatang. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 19.753 jiwa melakukan migrasi masuk ke Kota Bogor. Pada tahun 2023, angka migrasi masuk meningkat menjadi 19.981 jiwa. Peningkatan migrasi masuk ini mencerminkan daya tarik Kota Bogor sebagai lokasi yang menawarkan berbagai peluang, baik dalam hal pekerjaan maupun kualitas hidup.

Tabel 2.2 Tingkat Migrasi di Kota Bogor 2021-2023

Tahun	Migrasi Masuk (Jiwa)	Migrasi Keluar (Jiwa)
2021	20.661	17.699
2022	19.753	16.906
2023	19.981	16.046

Sumber : Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun

2021, 2022, dan 2023 (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2023)

Pergerakan penduduk ini memberikan dampak positif, terutama pada sektor perekonomian, di mana pertumbuhan populasi dapat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Namun, dampak negatif juga bisa muncul jika lingkungan tidak mampu mendukung pertumbuhan yang terjadi. Misalnya, jika infrastruktur tidak memadai, atau jika ada masalah dalam penyediaan layanan publik, maka peningkatan jumlah penduduk bisa menimbulkan tantangan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas layanan, dan masalah lingkungan lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan ini dengan hati-hati, agar manfaat dari mobilitas penduduk dapat dimaksimalkan, sementara potensi masalah dapat diminimalkan. Strategi pemerintah dalam persebaran dan mobilitas penduduk melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman
2. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas

3. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pembangunan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

(Tin Herawati, 2022)

Jumlah jaringan transportasi umum berdasarkan data milik Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor telah mencapai 45,67% dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bogor yang mengalami peningkatan sebesar 1,53 persen setiap tahunnya (Janthy Trilusianthy Hidayat, 2021). Sebagai Jalur Lintas Jalan Regional, Kota Bogor berperan dalam menghubungkan antara sebuah kawasan yang berada di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Kawasan tersebut merupakan kawasan dengan objek wisata yang beragam sehingga mengakibatkan peningkatan mobilitas dan aglomerasi masyarakat Kota Bogor (Azwanda, 2024).

Kota Bogor mendapatkan peringkat kelima sebagai kota termacet di Indonesia dan peringkat ke-821 sebagai kota termacet di dunia. Data tersebut didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh INRIX, sebuah perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, melalui Analisis Global Traffic Scorecard 2021. Penyebab utamanya adalah Kota Bogor telah menjadi kota tujuan wisata sehingga lalu lintas di Kota Bogor sering dipadati oleh kendaraan dari luar daerah. Penelitian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor untuk membenahi infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti transportasi massal dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti percepatan

pembangunan infrastruktur jalan alternatif seperti *Bogor Outer Ring Road (BOR)*, *Bogor Inner Ring Road (BIR)*, dan *Regional Ring Road (R3)*, serta dalam peningkatan pelayanan publik. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bogor juga selalu berusaha untuk menata dan meningkatkan transportasi yang terintegrasi, contohnya yakni mereformasi angkutan kota menjadi bus atau melakukan konversi angkot baru (Aguido Adi, 2022).

Penurunan mobilitas masyarakat Kota Bogor memiliki jumlah yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat sejak pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tanggal 3 Juli 2021. Walikota Bogor, Bima Arya, menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang datang ke Kota Bogor dan yang keluar dari Kota Bogor telah mengalami pengurangan karena adanya pemberlakuan penyekatan kendaraan bermotor selama 24 jam pada enam lokasi penyekatan dan enam titik *check point* oleh Satgas Penanganan Covid-19 melalui Polresta Bogor dan Kodim 0606 Kota Bogor selama pelaksanaan PPKM Darurat (Mubyarsah, 2021).

2.3 Kebijakan Transportasi di Kota Bogor

Kebijakan transportasi Indonesia didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut amanat UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi bangsa. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional, dan mereka memiliki potensi dan peran untuk dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan kesejahteraan. Untuk memastikan penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan wewenang pembinaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat. Peraturan tersebut juga membahas Rencana Umum Jaringan Trayek, yang mencakup jaringan trayek, kebutuhan untuk kendaraan bermotor umum yang terintegrasi dan berjenjang, serta subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor dengan tarif yang wajar. Dokumen ini memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan, yang merupakan dasar untuk menyusun jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum. Jaringan trayek diatur menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang, dengan lintasan kendaraan bermotor umum yang memiliki asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan transportasi umum di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Transportasi. Regulasi ini memperhatikan kondisi penyelenggaraan transportasi dan menyikapi arah kebijakan pembangunan transportasi di Kota Bogor. Selain itu, peraturan ini juga mencakup kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh moda transportasi. Salah satu tujuan penting lainnya adalah mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berlebihan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum, sekaligus

berupaya menurunkan tingkat pencemaran udara yang dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan.

Penyelenggaraan transportasi umum didasarkan pada prinsip keseimbangan, pengembangan, dan penataan jaringan trayek dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan penyelenggaraan ini sangat bergantung pada peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, antara lain:

- a) Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai regulator dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal.
- b) Perusahaan bus sebagai manajemen angkutan umum yang bertugas menyediakan layanan berkualitas tinggi serta perlindungan bagi pengguna.
- c) Perusahaan angkutan umum yang berperan sebagai operator dalam menjalankan operasional angkutan massal demi menjamin keberlanjutan usaha.
- d) Masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan berkualitas dalam mendukung mobilitas mereka.
- e) Masyarakat umum yang juga berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan untuk memastikan kualitas layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan angkutan umum massal.

Dengan kolaborasi antara semua pihak ini, diharapkan sistem transportasi umum di Kota Bogor dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang lebih baik.

Upaya peningkatan keselamatan pada angkutan umum di Kota Bogor menjadi kewajiban bagi perusahaan angkutan umum. Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup dua aspek utama: jenis pelayanan dan mutu pelayanan. Jenis pelayanan meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan, yang berfungsi sebagai acuan evaluasi dan pengawasan kinerja angkutan umum di Kota Bogor. Sementara itu, mutu pelayanan terdiri dari indikator, nilai, ukuran, atau jumlah yang digunakan untuk menilai kualitas layanan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Walikota Bogor menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal di Kota Bogor.

Regulasi tersebut memberikan penjelasan tentang jenis pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal. Pertama, jenis pelayanan keamanan yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a) Keamanan Kendaraan: Meliputi identitas kendaraan, identitas awak kendaraan, lampu penerangan di dalam kendaraan, tingkat kegelapan kaca sesuai ketentuan, dan nomor call center.
- b) Keamanan Halte dan Fasilitas Pendukung Halte: Meliputi lampu penerangan, petugas keamanan, dan informasi gangguan keamanan.

Kedua, jenis pelayanan keselamatan yang meliputi:

- a) Keselamatan Bus: Termasuk kelayakan kendaraan, peralatan keselamatan, fasilitas keselamatan, informasi tanggap darurat, dan fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.

- b) Keselamatan Shelter dan Prasarana Pendukung Lainnya: Termasuk keselamatan pada shelter dan prasarana pendukung lainnya.

Ketiga, jenis pelayanan kenyamanan yang meliputi:

- a) Kenyamanan Shelter dan Fasilitas Pendukung Shelter: Termasuk lampu penerangan, ventilasi udara, fasilitas kebersihan, dan fasilitas naik-turun penumpang.
- b) Kenyamanan di Dalam Bus: Termasuk lampu penerangan, kapasitas angkut, pengatur suhu ruangan, fasilitas kebersihan, dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Keempat, jenis pelayanan keterjangkauan yang meliputi:

- a) Kemudahan Perpindahan Penumpang Antar Koridor
- b) Ketersediaan Integrasi Jaringan Trayek
- c) Keterjangkauan Tarif

Kelima, jenis pelayanan kesetaraan yang berupa prioritas pelayanan dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas, penumpang lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil dengan menyediakan kursi prioritas dan kursi khusus untuk kursi roda serta memperhatikan kemiringan lantai.

Keenam, jenis pelayanan keteraturan yang meliputi:

- a) Waktu Tunggu dan Berhenti
- b) Kecepatan Perjalanan
- c) Informasi Pelayanan
- d) Akses Keluar-Masuk Halte
- e) Informasi Halte Transit

f) Time Table

g) Informasi Gangguan Bus

h) Sistem Pembayaran

Dengan demikian, regulasi ini memberikan pedoman yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, yang dikenal dengan nama Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor (Perumda Trans Pakuan Kota Bogor). BUMD ini didirikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor transportasi, sehingga operasionalnya dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perumda ini mencakup berbagai layanan, seperti angkutan umum, angkutan wisata, bengkel umum, kendaraan derek, perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar, serta jenis usaha lain di bidang transportasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, mendukung perekonomian daerah, membantu pembangunan daerah, memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Perumda Trans Pakuan berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dalam pengambilan keputusan strategis serta pejabat pemerintah daerah lainnya dalam fungsi pembinaan teknis

dan pengawasan. Sumber modal untuk Perumda Trans Pakuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman daerah dan/atau BUMD lain, serta hibah dari pemerintah pusat dan daerah.

2.4 Transisi Transportasi di Kota Bogor

Kota Bogor berada di kawasan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) secara geografis. Letak geografis tersebut membuat Kota Bogor memiliki wilayah yang strategis karena berada dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibukota dan kota metropolitan. Perkembangan wilayah di DKI Jakarta membuat Kota Bogor memiliki tuntutan untuk mengikuti perkembangan yang serupa dengan sistem metropolitan Jabodetabek. Jaringan jalan yang berada di Kota Bogor pun saling terintegrasi dengan jaringan jalan yang berada di wilayah DKI Jakarta, seperti jalan tol dan jalur *commuter line*. Integrasi jaringan jalan ini membuat Kota Bogor dan DKI Jakarta saling terhubung sehingga akan meningkatkan aksesibilitas antar kedua wilayah tersebut. Keberadaan jaringan jalan yang sudah terintegrasi tidak menjamin jalur lalu lintas di Kota Bogor menjadi teratur dan terarah.

Kota Bogor memiliki permasalahan utama yang menjadi salah satu skala prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor yaitu penanganan transportasi dan kemacetan. Keterbatasan aksesibilitas, baik dari pelayanan dan jaringan jalan yang masih bertumpu di pusat kota menjadi penyebab dari munculnya kedua permasalahan tersebut. Masyarakat Kota Bogor yang bermobilisasi ke wilayah Jabodetabek membuat kebutuhan transportasi umum mengalami peningkatan. Angkutan Kota (Angkot) menjadi transportasi umum

andalan milik Kota Bogor. Tarif yang murah dan beragamnya trayek angkot memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor dalam bermobilitas. Peningkatan jumlah angkot yang membuat Kota Bogor mendapat julukan sebagai “Kota Seribu Angkot” serta para supir angkot yang tidak taat pada peraturan lalu lintas, seperti berhenti di sembarang tempat, tidak memberikan lampu isyarat, dan membawa dalam kapasitas yang berlebihan menjadi penyumbang kemacetan yang terjadi di Kota Bogor (Robby Hartono, 2016).

Pemerintah Kota Bogor menghadapi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi berupa perubahan atau transisi moda transportasi dari Angkot menjadi Biskita. Biskita merupakan moda layanan transportasi umum yang menggunakan konsep Bus Rapid Transit (BRT). Biskita Kota Bogor adalah bentuk program subsidi yang diberikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi umum di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Pemberian subsidi tersebut menjadi perwujudan kolaborasi antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemerintah Kota Bogor yang merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Biskita Transpakuan berpedoman pada konsep BRT yang mensyaratkan pemenuhan berbagai aspek, seperti keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pelayanan sehingga kehadiran Biskita diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi umum yang terbaik serta pilihan cerdas masyarakat Bogor dalam bermobilitas.